

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan masalah	9
1.3. Tujuan Masalah	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Konsepsi Kebijakan.....	12
2.1.1. Pengertian Kebijakan	12
2.1.2. Implementasi Kebijakan.....	14
2.1.2.1. Konsepsi Implementasi Kebijakan	14
2.1.2.2. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijaka.....	15
2.1.3. Evaluasi Kebijakan.....	16
2.1.4. Aspek Analisis Evaluasi Implementasi Kebijakan	18
2.1.4.1. Relevansi (<i>Relevance</i>).....	18
2.1.4.2. Efektifitas (<i>Effectiviness</i>).....	18
2.1.4.3. Efisiensi (<i>Efficiency</i>).....	19
2.1.4.4. Keadilan (<i>Equity/Fairness</i>).....	19
2.1.4.5. Dampak (<i>Impact</i>)	20
2.1.4.6. Proses Implementasi (<i>Implementation Process</i>).....	20
2.1.4.7. Partisipasi (<i>Participation</i>)	21
2.1.4.8. Transparansi (<i>Transparency</i>)	21

2.2.	Konsepsi Pemerintah Daerah.....	22
2.2.1.	Pengertian Pemerintah Daerah	22
2.2.2.	Tujuan dan Kewenangan Pemerintah Daerah	22
2.2.3.	Kewenangan Pemerintah Daerah	24
2.2.3.1.	Tugas Pembantuan <i>Medebewind</i>	26
2.3.	Konsepsi Pariwisata.....	28
2.3.1.	Pengertian Pariwisata	28
2.3.2.	Jenis-Jenis Pariwisata	29
2.3.2.1.	Wisata Seni dan Budaya.	29
2.3.2.2.	Wisata Medis.	29
2.3.2.3.	Travel Olahraga.	29
2.3.2.4.	Wisata Bisnis.	29
2.3.2.5.	Wisata ke Politik.	30
2.3.2.6.	Wisata Komunitas.	30
2.3.2.7.	Wisata ke Bumi.....	30
2.3.2.8.	Wisata ke perairan (Bahari).	30
2.3.2.9.	Wisata Alam.....	30
2.4.	Konsepsi Hak Pengelolaan Lahan	30
2.5.1.	Definisi Hak Pengelolaan Lahan	30
2.5.2.	Karakteristik Hak Pengelolaan Lahan	31
2.5.	Penelitian Terdahulu.....	32
2.6.	Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN		36
3.1.	Pendekatan Penelitian.....	37
3.2.	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.2.1.	Studi Dokumentasi	37
3.2.2.	Wawancara	37
3.2.3.	Observasi Partisipatif	38
3.3.	Validitas Data.....	38
3.3.1.	Analisis Data	40
3.3.1.1.	Reduksi Data	40

3.3.1.2. Penyajian Data	40
3.3.1.3. Verifikasi/ Keputusan.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Gambaran Umum	42
4.2. Hasil Penelitian.....	45
4.2.1. Latar Belakang Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No.7 Tahun 2018 Tentang RIPARDA	49
4.2.2. Positioning RIPARDA Sebelum Menjadi Peraturan Daerah...	56
4.2.3. Fakta dan Opini Terhadap Implementasi Dilapangan	61
4.3. Pembahasan	90
4.3.1. Implementasi Peraturan Daerah tentang RIPPARDA Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Batu Hiu	90
4.3.1.1. Relevansi Peraturan Daerah Tentang RIPPARDA Dalam Pengelolaan Wisata Batu Hiu	91
4.3.1.2. Efektivitas Peraturan Daerah tentang RIPPARDA dalam Pengelolaan Wisata Batu Hiu	93
4.3.1.3. Efisiensi Peraturan Daerah tentang RIPPARDA dalam Pengelolaan Objek Wisata Batu Hiu	102
4.3.1.4. Keadilan Peraturan Daerah tentang RIPPARDA dalam Pengelolaan Objek Wisata Batu Hiu	111
4.3.1.5. Dampak Peraturan Daerah tentang RIPPARDA dalam Pengelolaan Objek Wisata Batu Hiu	119
4.3.1.6. Proses Implementasi Peraturan Daerah tentang RIPPARDA dalam Pengelolaan Objek Wisata Batu Hiu	127
4.3.1.7. Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang RIPPARDA terhadap Pengelolaan Objek Wisata Batu Hiu	131
4.3.1.8. Transparansi Peraturan Daerah tentang RIPPARDA dalam Pengelolaan Objek Wisata Batu Hiu	1336
BAB V PENUTUP	141
5.1. Kesimpulan.....	141

5.2. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA.....	145

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Perbedaan Sifat Pembagian Kewenangan.....	27
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Model Kebijakan Publik David Easton.....	13
Gambar 2.2 : Kerangka Berfikir.....	35
Gambar 3.1 : Bagan Analisis Kualitatif Miles Huberman	41